

ABSTRAK

Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dalam mendukung kinerja kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara masih menghadapi kendala keterbatasan sarana, ketimpangan kompetensi SDM, lemahnya koordinasi antar-unit, dan belum adanya evaluasi sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan berdasarkan indikator Steers (1985) pencapaian tujuan, kualitas pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya, koordinasi, dan evaluasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparatur terkait, perangkat daerah, pengamat kebijakan, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ini belum berjalan efektif. Dari 144 kegiatan sepanjang tahun 2025 yang hanya didukung oleh 8 pegawai dan sarana terbatas, terdapat 21 kegiatan yang terlambat 15–25 menit serta 8 kegiatan dengan perubahan acara mendadak. Beban kerja yang tinggi memaksa pegawai multi-tasking sehingga pelayanan kurang optimal. Selain itu, koordinasi antar-unit masih manual tanpa sistem informasi terpadu, dan evaluasi pasca-kegiatan hanya dilakukan secara informal. Faktor pendukung meliputi kompetensi dasar aparatur yang memadai dan pola koordinasi awal yang sudah berjalan. Namun, faktor penghambat lebih dominan, yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi spesifik SDM, minimnya sarana prasarana, serta koordinasi lintas unit yang belum terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas memerlukan penguatan sistem koordinasi, peningkatan kompetensi teknis aparatur, serta perbaikan sarana prasarana melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kata kunci: Efektivitas, Protokol, Komunikasi, Pimpinan, Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif memerlukan sinergi antara kepemimpinan kepala daerah, kebijakan strategis, serta dukungan manajemen internal yang profesional. Dalam konteks tersebut, protokol dan komunikasi pimpinan memegang peranan penting. Protokol berfungsi memastikan setiap kegiatan resmi berlangsung tertib, berwibawa, dan sesuai aturan perundang-undangan, mulai dari tata tempat, tata urutan, hingga tata cara penyelenggaraan acara. Sementara itu, komunikasi pimpinan menjadi saluran strategis untuk menyampaikan pesan, membangun citra positif, serta mengelola hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua fungsi ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga bagian dari strategi pemerintahan untuk membentuk persepsi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan (Hasim, Pangaribuan & Rijal, 2023:45).

Secara teoritis, keprotokolan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang mengatur tata penghormatan kepada pejabat negara, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing melalui penyelenggaraan acara. Sementara itu, komunikasi pimpinan erat kaitannya dengan teori komunikasi organisasi, di mana penyampaian pesan yang efektif dari pimpinan ke publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan kata lain, protokol dan komunikasi pimpinan